

Hanya Delapan Persen Zakat Dipercayakan Kepada LAZ

Bandung – Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan meminta Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk memprioritaskan sistem penyaluran zakat produktif, ketimbang konsumtif. Heryawan pun meminta masyarakat mengoptimalkan peran LAZ sebagai pengelola zakat.

Data dari Badan Amil Zakat (BAZ) Jabar, menunjukkan, setiap tahunnya, potensi perolehan zakat fitrah di Jabar mencapai Rp 125 miliar. Sementara potensi zakat malnya mencapai Rp 75 miliar per bulan. Zakat yang terserap itu disalurkan untuk 12 juta mustahik yang masuk kategori warga miskin di Jabar.

Dari perolehan zakat tersebut, hanya delapan persen uang zakat tersebut yang dikelola oleh BAZ. Kebanyakan dana zakat itu dikelola langsung oleh dewan keluarga masjid dan langsung dibagi habis kepada kaum mustahik.

Heryawan menjelaskan, keberadaan LAZ memang harus dimaksimalkan. Dia menyatakan, secara bertahap minat masyarakat dalam menyalurkan zakatnya kepada LAZ harus ditingkatkan. Namun demikian, lanjut dia, terserah masyarakat yang menentukan lembaga yang dipercaya untuk mengelola zakatnya.

Yang terpenting, tegas Heryawan, dana zakat tersebut sampai kepada mustahik. Pihaknya mengimbau LAZ untuk mulai memprioritaskan system penyaluran zakat produktif. Artinya, lanjut dia, dana zakat tersebut disalurkan untuk kepentingan yang berkesinambungan.

Menurut dia, selama ini dana tersebut disalurkan untuk kepentingan yang konsumtif. Artinya, tegas Heryawan, dana itu disalurkan untuk menutupi kebutuhan pokok masyarakat. "Yang konsumtif harus tetap ada. Tapi yang produktif harus diprioritaskan," ujar Heryawan kepada wartawan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, akhir pekan lalu.

Pihaknya menjelaskan, penyaluran zakat produktif yang dimaksud, di antaranya untuk bea siswa dan modal usaha. Heryawan menegaskan, saat ini banyak masyarakat yang tergolong mustahik yang membutuhkan suntikan modal.

Heryawan menyatakan, ke depannya mustahik yang diberi modal usaha itu berpeluang menjadi muzaki. Dengan demikian, lanjut dia, maka indeks pembangunan manusia (IPM) Jabar akan membaik. Konsep pemberantasan kemiskinan secara syariah tersebut, papar dia, sangat membantu pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan.

Dia mengakui, saat ini pun BUMN dan BUMD di Jabar tengah digenjut untuk menyalurkan dana sosialnya bagi kepentingan yang berkesinambungan. Bahkan, Heryawan meminta dunia perbankan untuk meningkatkan dana kredit produktif secara lunak. "Yang penting harus disalurkan kepada yang mau dan mampu," tambahnya.

Diakui Heryawan, LAZ di Jabar sudah cukup banyak. Pihaknya mengakui, kinerja LAZ di Jabar sangat baik dan profesional. Yang perlu digenjut saat ini, lanjut dia, yakni meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ.

GUBERNUR MINTA ZAKAT DISALURKAN SECARA PRODUKTIF

Written by 4N

Monday, 24 August 2009 18:14 -

Heryawan menegaskan, masyarakat yang tergolong dalam kelompok muzaki pun diminta maksimal meningkatkan kualitas ibadahnya dengan berzakat. Diakui Heryawan, sebenarnya realisasi perolehan zakat yang selama ini masih bisa ditingkatkan.

“Bila muzaki maksimal berzakat dan lembaga amil zakat dipercaya. Insyaallah Jabar bisa menjadi daerah percontohan,” tutur dia lagi. Paling tidak, tegas Heryawan, harapan Jabar menjadi provinsi zakat pada 2011 akan terealisasi. Terlebih lagi, lanjut dia, saat ini gerakan sadar zakat sudah dicanangkan. Gerakan itu, lanjut dia, digagas oleh Pemprov Jabar, Depag Jabar, serta LAZ.

Asisten Daerah III, Setda Jabar, Pery Suparman, menjelaskan, gerakan sadar zakat telah dideklarasikan tahun ini. Menurut dia, Jabar merupakan daerah yang memiliki potensi perolehan zakat tertinggi dibandingkan daerah lain. Dia mengakui, hamper setiap tahun perolehan zakat di Jabar meningkat.

Menurut dia, peningkatan jumlah dana zakat yang terserap seharusnya berkorelasi dengan penurunan jumlah angka kemiskinan. “Kami harapkan, setiap tahunnya jumlah mustahik berkurang, sementara muzaki bertambah,” ujarnya.

Diakui Pery, sistem pengelolaan zakat saat ini memang disiapkan untuk menuntaskan kemiskinan. Dia menandaskan, berat bila kebutuhan dana program pemberantasan kemiskinan hanya dibebankan kepada APBD Jabar. N san